

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: KONSEPSI, URGENSI, DAN RELEVANSINYA DALAM DOKTRIN ISLAM

Tarmizi<sup>1,2,3\*</sup>

<sup>1</sup>Pimpinan Daarul Qur'an

<sup>2</sup>Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta

<sup>3</sup>STMIK Antar Bangsa

\*Email: tarmizi.as9@gmail.com

Diterima: 27 Februari 2020

Direvisi: 3 April 2020

Disetujui: 1 Mei 2020

### ABSTRAK

*Studi ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural merupakan konsep, ide, atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (set of believe) dan penjelasan yang mengakui serta menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Pendidikan multikultural sebagaimana tersebut adalah sangat urgen untuk diimplementasikan dalam praksis pendidikan. Hal ini karena pendidikan berperspektif multikultural diyakini mampu menumbuh-kembangkan peserta didik menjadi pribadi yang bukan hanya bangga atas dirinya (budaya, bahasa, dan kekhususan lain yang dimilikinya), namun ia juga mampu mengakui, menerima, menghormati kekhususan yang berbeda yang dimiliki orang lain sehingga mereka hidup dalam kesejajaran. Konklusi ini menolak pendapat J. Hector dengan teori melting pot yang menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal. Juga menolak teori salad bowl yang diprakarsai oleh Horrace. Sebagai yang terakhir, pendidikan multikultural memiliki relasi konseptual dan relevansinya dengan perspektif agama Islam. Hal itu dapat dipahami dari Al-Qur'an yang menyebut bahwa Tuhan benar-benar telah memuliakan umat manusia (17:70). Selain itu, Tuhan juga secara jelas menegaskan bahwa Ia "sengaja" menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda, dengan maksud agar manusia saling mengenal, saling mengakui eksistensinya, dan saling menghormati (49:13).*

**Kata kunci:** Islam, Pendidikan Multikultural, Urgensi

### ABSTRACT

*This study shows that multicultural education is a concept, idea, or philosophy as a set of beliefs and explanations that recognize and assess the importance of cultural and ethnic diversity in shaping the lifestyle, social experience, personal identity, educational opportunities of individuals, group, or country. Multicultural education is very urgent to be implemented in the praxis of education. This is because multicultural perspective education is believed to adequate to foster students to become individuals who are not only proud of themselves (culture, language, and other specificities they have), but they are also able to recognize, accept, respect the differences so that they live in alignment. This conclusion rejects J. Hector's opinion with the melting pot theory which emphasizes the unification of culture and merges the origin of culture itself. This conclusion also rejects the salad bowl theory initiated by Horrace. Finally, multicultural education has a conceptual relation and relevance to the perspective of the Islamic religion. This can be understood from the Qur'an which states that God truly glorified humanity (17:70). In addition, God also clearly emphasized that God "deliberately" created humans in different circumstances, with the intention that humans knew each other, recognized each other's existence and respected each other (49:13).*

**Keywords:** Islam, Multiculturalisme, and Multicultural Education

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial, meniscayakan hidup secara interaktif dengan sesama. Kehidupan yang serba interaktif antar satu dan lainnya selain menjadi kebutuhan manusia juga berkemungkinan memunculkan konflik. Sejatinya konflik muncul dari adanya perbedaan, dan perbedaan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Secara faktual manusia sangat beragam, baik dari sisi suku, ras, etnis, golongan, warna kulit, agama, tradisi, budaya, dan lain sebagainya. Dengan demikian konflik juga dapat muncul sebab perbedaan hal-hal tersebut (Kementerian Agama, 2012:2).

Menurut Bhikhu Parekh (2000:142-276), kemajemukan (plurality), keanekaragaman (diversity) dan kepelbagaian (heterogenity) serta keberagaman masyarakat merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan. Keadaan negara-negara di dunia saat ini, memiliki keadaan yang sama dilihat dari pluralitas, diversitas, dan heterogenitas penduduknya. Kenyataan seperti ini menuntut dibangunnya berbagai “saluran dialog” oleh semua tokoh di berbagai sektor kehidupan. Keharusan ini dalam rangka menutup kemungkinan adanya entitas masyarakat yang mendapat diskriminasi dan eksploitasi dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi Zahara Idris (1987:7), pendidikan sebagai pilar utama dalam kehidupan masyarakat dunia, tidak boleh lepas dalam konteks mewujudkan kohesi sosial masyarakat dunia. Pendidikan sebagai proses pengembangan sumberdaya manusia untuk memperoleh kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimal memberikan relasi yang kuat antara individu dengan masyarakat dan lingkungan budaya sekitarnya.

Bahkan Driyarkara menyebut (1980:8), bahwa pendidikan merupakan proses “memanusiakan manusia” dimana manusia diharapkan mampu memahami dirinya, orang lain, alam dan lingkungan budayanya. Berkait dengan hal itu, dalam kalimat pendek, Ki Hadjar Dewantara menandakan (1977:9), bahwa lembaga-lembaga pendidikan sejatinya adalah pusat-pusat pengembangan kebudayaan. Atas dasar inilah pendidikan tidak boleh dan tidak dapat lepas dari budaya yang melingkupinya sebagai konsekuensi dari tujuan pendidikan itu sendiri,

yaitu mengasah rasa, karsa dan karya. Pencapaian tujuan pendidikan tersebut menuai tantangan sepanjang masa karena salah satunya adalah perbedaan budaya.

Tulisan ini diharapkan dapat menjawab beberapa hal mendasar terkait konsepsi pendidikan multikultural. Selain juga akan menjawab urgensi dan relevansinya dengan doktrin-doktrin agama Islam. Kajian serupa ini penulis pandang sangat penting paling tidak untuk menunjukkan betapa sangat mendesak melangsungkan praktek pendidikan yang berperspektif multikultural, yang diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang atas potensi-potensi konflik masyarakat yang tidak jarang bermula dari ketidaksiapan sekelompok masyarakat untuk memahami dan menerima masyarakat lainnya yang secara kultural berbeda.

Selain itu, kajian ini juga diharapkan semakin meneguhkan pendidikan multikultural karena ia memiliki relevansinya dengan doktrin-doktrin agama (Islam). Hal ini patut diketengahkan mengingat dalam konteks masyarakat Indonesia yang relatif religius. Adapun Metode penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis yang bersifat normatif filosofis yang disesuaikan dengan sumber-sumber kepustakaan.

## Kajian Pustaka

1. H.A.R. Tilaar (2010:4) disebut sebagai proses pembudayaan, dalam artian bahwa pendidikan adalah proses pengenalan dan pemilihan nilai-nilai kebudayaan, baik yang berakar dari masyarakat yang ada maupun perkembangan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip kontinuitas kebudayaan. Pandangan semacam ini penting untuk dikembangkan, mengingat konflik-konflik yang muncul di tengah masyarakat tidak jarang adalah akumulasi dari tidak adanya kesiapan untuk menerima keragaman dan perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Oleh karenanya kebutuhan terhadap pendidikan yang mampu mengakomodasi dan memberikan pembelajaran untuk mampu menciptakan budaya baru dan bersikap toleran terhadap budaya lain sangatlah penting atau dengan kata lain pendidikan yang memiliki basis multikultural akan menjadi

solusi dalam pengembangan sumberdaya manusia yang mempunyai karakter yang kuat dan toleran terhadap budaya lain.

2. Maslikhah (2007:74), pertautan antara pendidikan dan pandangan multikultural merupakan solusi atas realitas budaya yang beragam sebagai sebuah proses pengembangan seluruh potensi yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran atau agama.

3. Secara deklaratif, Ainul Yaqin menandakan (2005:3) bahwa fakta adanya pluralitas dan heterogenitas masyarakat, menempatkan pendidikan multikultural menjadi sangat urgen.

4. Jurnal pendidikan multikultural di Indonesia sebuah pandangan konsepsional Dede Rosyada (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta); Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keragaman etnik tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni menuju masyarakat adil makmur dan sejahtera. Karena itu, menjadi penting pengembangan pendidikan multikultural, sebuah proses pendidikan yang memberi peluang sama pada seluruh anak bangsa tanpa membedakan perlakuan karena perbedaan etnik, budaya dan agama, yang memberikan penghargaan terhadap keragaman, dan yang memberikan hak-hak sama bagi etnik minoritas, dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia internasional. Dalam hal ini, sekolah harus mendesain proses pembelajaran, mempersiapkan kurikulum dan desain evaluasi, serta mempersiapkan guru yang memiliki persepsi, sikap dan perilaku multikultural, sehingga menjadi bagian yang memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sikap multikultural para siswanya.

Novelti riset; Pendidikan multikultural sebagaimana tersebut adalah sangat urgen untuk diimplementasikan dalam praksis pendidikan. Hal ini karena pendidikan berperspektif multikultural diyakini mampu menumbuh-kembangkan peserta didik menjadi pribadi yang bukan hanya bangga atas dirinya (budaya, bahasa, dan kekhususan lain yang dimilikinya), namun ia juga mampu mengakui, menerima, menghormati kekhususan yang berbeda yang dimiliki orang lain sehingga mereka hidup dalam kesejajaran. pendidikan multikultural memiliki relasi konseptual dan relevansinya dengan perspektif agama Islam. Hal itu dapat dipahami dari Al-Qur'an yang

menyebut bahwa Tuhan benar-benar telah memuliakan umat manusia (17:70).

## METODE PENELITIAN

Adapun metode penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis yang bersifat normatif filosofis yang disesuaikan dengan sumber-sumber kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Filsafat Multikulturalisme

Menurut H.A.R. Tilaar (2012:861), filsafat multikulturalisme tidak dapat terlepas dari pemikiran dua filsuf kontemporer, John Rawls dari Universitas Harvard Amerika Serikat dan Charles Taylor dari Universitas McGill Kanada. Rawls adalah penganut liberalisme terutama dalam bidang etika, dan adapun Taylor dalam bidang filsafat budaya dan politik. Menurut Rawls (2003:52-57), suatu masyarakat yang adil bukanlah hanya menjamin the greatest good for the greatest number yang lazim dalam prinsip demokrasi. Filsafat Rawls menekankan arti self interest dan aspirasi pengenalan diri seseorang. Bagi Rawls (2003:52-55), manusia dilahirkan tanpa mengetahui sifat-sifatnya, posisi sosialnya, dan keyakinan moralnya. Dalam keadaan demikian, manusia tidak dapat memaksimalkan kemampuannya. Dari keadaan yang asli itu, Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan 1) Manusia harus mempunyai sejumlah kebebasan individual. Keadaan yang ini demikian diperlukan untuk bersama-sama menikmati kemerdekaan yang juga dimiliki oleh orang lain. 2) setiap ketidak-samaan sosial dan ekonomi harus memberikan kemungkinan keuntungan bagi yang tidak memperoleh keberuntungan. Bagi Rawls, prinsip pertama harus dapat dilakukan sebelum prinsip kedua.

Teori keadilan sebagaimana yang dikonstruksi Rawls dikritik oleh Robert Nozick. Nozick (1974) menolak pendapat Rawls dengan mengajukan tiga prinsip utama pendapatnya. 1) Keadilan dalam akuisisi. Yakni bagaimana seseorang pertama kali mendapatkan hak atas sesuatu (pendapat Nozick mencontohkan hak kepemilikan properti) yang sebelumnya tidak dimiliki. 2) Keadilan dalam transfer, yakni bagaimana seseorang memperoleh hak atas sesuatu yang telah ditransfer (misalnya dengan hadiah atau pertukaran) kepada seseorang oleh

orang lain. 3) Perbaiki ketidakadilan, yakni bagaimana mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang sah, jika terjadi ketidakadilan dalam akuisisi atau pemindahan.

Memerhatikan pendapat Nozick di atas, penulis berpendapat bahwa pendapat Nozick memiliki beberapa masalah. Hal ini dikarenakan dapat membenarkan praktek distribusi yang sangat tidak setara dan redistribusi tidak mungkin dilakukan kecuali untuk memperbaiki ketidakadilan sebelumnya. Bahkan semisal jika seseorang memiliki diri mereka sendiri, maka ia tidak berarti memiliki hak untuk melakukan apa pun yang diinginkan dengan diri mereka. Jika nilai keadilan terletak pada kebebasan, dan Nozick benar bahwa harta (properti) itu sangat penting untuk kebebasan, maka tentunya harus dipastikan bahwa setiap orang memiliki properti yang cukup untuk bebas. Bagian akhir dari kelemahan Nozick adalah bahwa pendapatnya lemah secara historis. Sejarah menunjukkan bahwa banyak akuisisi awal properti itu tidak adil, berdasarkan pencurian, eksploitasi, perbudakan, dan penjajahan. Semua properti yang berasal dari akuisisi yang tidak adil dipegang secara tidak adil. Seseorang tidak memiliki hak untuk mentransfer properti yang ia curi, pemilik baru juga tidak berhak atas apa yang mereka alami. Sehingga teori Nozick tidak reliable untuk dilaksanakan jika kita tidak memulai dari awal. Terkait pendapat dua tokoh tersebut, dalam konteks pandangan multikulturalisme, penulis berpandangan bahwa teori keadilan John Rawls lebih relevan dibanding Robert Nozick.

Menurut Melani Budianta, sebagaimana dikutip Rosyada (2017:318), multikulturalisme diawali dengan teori melting pot yang sering diwacanakan oleh J. Hector seorang imigran asal Normandia. Teori Hector menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal, sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru yakni budaya Amerika. Walaupun diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur white angso saxon protentant (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih berasal dari Eropa.

Menurut Newt Gingrich, sebagaimana disebut Kasinyo Harto (2014:25), melting pot tidak cukup menghadapi gempuran etnisisme. Dalam pandangannya, ketika orang datang ke

Amerika, seharusnya mereka menanggalkan seluruh masa lalunya, kemudian mengenakan identitas barunya, yaitu identitas Amerika. Namun penghapusan masa lalu adalah sesuatu yang musykil, bahkan orang yang mengaku paling modern sekalipun masih punya kenangan masa lalu (collective memories) tentang tanah leluhur mereka di Inggris dan Skotlandia. Padahal, mereka hijrah ke dunia baru itu lebih dari dua abad yang lampau.

Sedangkan James A. Banks (2015) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural muncul dari gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat di mana orang Afrika-Amerika menuntut agar lembaga pendidikan dan lainnya memasukkan sejarah dan budaya mereka ke dalam kurikulum dan melakukan reformasi lain yang akan menciptakan kesetaraan pendidikan yang lebih besar. Gerakan hak-hak sipil (The Civil Rights Movement) bergema di seluruh Amerika Serikat dan dunia dan merangsang kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya untuk membuat tuntutan serupa dari sekolah, perguruan tinggi, dan universitas, serta lembaga-lembaga lain di negara-bangsa mereka.

Kemudian, ketika komposisi etnik Amerika kian beragam dan budaya mereka kian majemuk, maka teori melting pot dikritik dan muncul teori baru yang populer dengan nama salad bowl sebagai sebuah teori alternatif dipopulerkan oleh Horrace. Berbeda dengan melting pot yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, teori salad bowl atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tetapi sebaliknya kultur-kultur lain diluar WASP diakomodasi dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi dan membangun budaya Amerika, sebagai sebuah negara Nasional. Pada akhirnya, interaksi kultural antar berbagai etnik tetap masing-masing memerlukan ruang gerak yang leluasa, sehingga dikembangkan teori pluralisme kebudayaan (cultural pluralism), yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua yakni ruang public dan ruang etnik mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka (Rosyada, 2017:318).

Kata multikulturalisme, menurut Parsudi Suparlan (2002:1) memiliki makna dasar

kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut para ahli sangat beragam, namun dalam konteks ini kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya. Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Sebagai sebuah ide atau ideologi, masih menurut Suparlan (2002:2), multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya dalam masyarakat yang bersangkutan. Kajian-kajian mengenai corak kegiatan, yaitu hubungan antar manusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia.

Bagi Yaya Suryana dan Rusdiana (2015:99), makna multikulturalisme bukan hanya pengakuan terhadap budaya (kultur) yang beragam, melainkan juga pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi politik, sosial, ekonomi, dan lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, multikulturalisme adalah gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Memerhatikan cakupan makna multikulturalisme yang demikian, maka multikulturalisme merupakan suatu resiko yang perlu diambil dalam membina masyarakat bangsa yang heterogen.

Menurut Dede Rosyada (2017:317), bahwa sejarah multikulturalisme adalah sejarah masyarakat majemuk. Amerika Serikat, Canada, Australia adalah dari sekian negara yang sangat serius mengembangkan konsep dan teori-teori multikulturalisme dan Pendidikan multikultural, karena mereka adalah masyarakat imigran dan tidak bisa menutup peluang bagi imigran lainnya untuk masuk dan bergabung di dalamnya. Akan tetapi, negara-negara tersebut merupakan contoh negara yang

berhasil mengembangkan masyarakat multikultur dan mereka dapat membangun identitas kebangsaannya, dengan atau tanpa menghilangkan identitas kultural mereka sebelumnya.

### **Pendidikan Multikultural dan Urgensinya**

Menurut Tilaar (2004:75), secara garis besar multikulturalisme memiliki dua arti. Pertama, pengertian dari asal katanya, yaitu “multi” yang berarti majemuk (plural), “kulturalisme” yang berarti kultur atau budaya. Istilah multi (plural) mengandung arti yang berjenis-jenis, karena pluralisme bukan berarti sekedar sebuah pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis-jenis tetapi pengakuan tersebut mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial dan ekonomi. Adapun sebagai sebuah ide, Menurut Parsudi Suparlan (2002:2-3), pendidikan multikultural dibahas dan diwacanakan pertama kali di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil (civil right movement). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat publik, di rumah, di tempat-tempat kerja, dan di lembaga-lembaga pendidikan, yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Selama itu, di Amerika dan negara-negara Eropa Barat hanya kebudayaan kulit putih yang Kristen. Golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat-masyarakat tersebut dikelompokkan sebagai minoritas dengan pembatasan hak-hak mereka. Gerakan hak-hak sipil ini, menurut James A. Banks (1989:4-5), berimplikasi pada dunia pendidikan, dengan munculnya beberapa tuntutan untuk melakukan reformasi kurikulum pendidikan yang sarat dengan diskriminasi. Pada awal tahun 1970-an munculah sejumlah kursus dan program pendidikan yang menekankan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan etnik dan keragaman budaya (cultural diversity).

Menurut James A. Banks (2001:28), pendidikan multikultural merupakan konsep, ide, atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (set of believe) dan penjelasan yang mengakui serta menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari

individu, kelompok, maupun negara. Bagi Banks (2001:3), pendidikan multikultural setidaknya memiliki tiga hal mendasar: ide atau konsep, gerakan reformasi pendidikan, dan proses. Pendidikan multikultural menggabungkan gagasan bahwa semua siswa (terlepas dari jenis kelamin, kelas sosial, dan karakteristik etnis, ras, atau budaya mereka) harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Gagasan penting lainnya dalam pendidikan multikultural adalah bahwa beberapa siswa, karena karakteristik ini, memiliki kesempatan yang lebih baik untuk belajar di sekolah karena mereka saat ini terstruktur daripada siswa yang berasal dari kelompok lain atau yang memiliki karakteristik budaya yang berbeda. Pendidikan multikultural juga merupakan gerakan reformasi yang mencoba mengubah sekolah dan lembaga pendidikan lainnya sehingga siswa dari semua kelas sosial, gender, ras, bahasa, dan kelompok budaya akan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Pendidikan multikultural melibatkan perubahan total sekolah atau lingkungan pendidikan. Hal itu tidak terbatas pada perubahan kurikuler (James A. Banks, 2001:4).

Memperhatikan uraian pendidikan multikultural di atas, maka penulis berpendapat bahwa pendidikan multikultural adalah sangat urgen untuk diimplementasikan dalam praksis pendidikan. Atas pendapat ini, penulis beralasan bahwa baik dalam konteks global maupun regional, bahkan konteks nasional Indonesia, pandangan multikultural adalah sangat penting untuk menjaga keutuhan, kekuatan, kebersamaan dan kemajuan bangsa dan dunia, sebab pandangan multikultural menjamin hak-hak setiap individu, juga penghormatan atas ke-khasan yang dimiliki oleh setiap individu. Kebalikan dari itu, pendidikan yang tidak mengakomodir pandangan multikultural hampir dapat dipastikan akan menghasilkan pribadi manusia yang tidak dapat berdamai dengan orang lain, dan pada akhirnya akan menimbulkan konflik yang mengganggu dan merusak kedamaian dan persatuan bangsa dan dunia.

Menurut Johan Galtung (1973:35), secara sederhana konflik dapat dimaknai sebagai tidak bertemunya kepentingan antar aktor. Selanjutnya oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z.

Rubin (2011:9) conflict dimaknai sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest) atau pandangan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Terkait dengan hal itu menurut Imam Taufiq (2016:31) antonim dari konflik adalah damai. Damai yang sesungguhnya adalah yang dinamis, partisipatif, dan berjangka panjang. Johan Galtung menyebutkan (1969:167) bahwa perdamaian harus didasarkan pada tiga prinsip utama: 1). Istilah perdamaian harus digunakan untuk tujuan-tujuan sosial, paling tidak dalam bentuk persetujuan secara verbal. 2). Tujuan-tujuan sosial yang dimaksud mungkin adalah hal yang kompleks dan sulit, namun bukan hal yang mustahil; 3). Pernyataan perdamaian harus jauh dari kekerasan. Pendidikan multikultural dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan tata kehidupan masyarakat dunia yang damai, sebab masing-masing individu menyadari adanya pihak selain dirinya yang sejajar dengannya, sehingga saling menghormati antara satu dan lainnya. Selain dari pada itu, pendidikan multikultural dapat diandalkan untuk mencegah timbulnya kekerasan yang dalam istilah Galtung (1990:291-305) disebut kekerasan berbasis budaya (cultural violence). Kekerasan berbasis budaya adalah istilah yang digunakan untuk menyebut berbagai aspek budaya yang digunakan untuk melegitimasi tindak kekerasan baik secara langsung maupun dalam bentuknya yang terstruktur.

Multikulturalisme merupakan salah satu kunci masalah dunia yang krusial, termasuk Indonesia dalam menghadapi perubahan-perubahan global masa depan. Multikultural adalah konsep pembudayaan. Oleh karena pendidikan adalah proses pembudayaan, maka masyarakat multikultural hanya dapat diciptakan melalui proses pendidikan, yakni pendidikan yang berperspektif multikultural. Menurut Wasino (2011), di dalam sejarah pendidikan multikultural terdapat empat fase yang dilalui, yaitu:

- a. Upaya mempersatukan kajian-kajian etnis pada setiap tingkat kurikulum.
- b. Pendidikan multi etnis sebagai usaha untuk menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan pendidikan.

- c. Kelompok-kelompok marjinal yang mendapat perlakuan diskriminatif.
- d. Perkembangan teori, riset, dan praktek, perhatian hubungan antar ras, kelamin, dan kelas, dan menghasilkan tujuan bersama para teoritis dan pendidik.

Tujuan dari semua tahap pendidikan multikultural tersebut adalah penghargaan terhadap perbedaan budaya. Semua murid apapun asal ras atau etnis, kecacatan, kelamin, kelas sosial dan orientasi seksualnya akan dapat menikmati pendidikan yang sama (Wasino, 2011).

### **Pendidikan Multikultural: Pengalaman Indonesia**

Keberagaman Indonesia juga ditunjukkan oleh diferensiasi sosial dalam bentuk adanya suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia dalam sekitar 260 juta penduduk. Kenyataan ini, bagi Choirul Mahfudz (2016:81), semakin meneguhkan urgensi pendidikan multikultural bagi masyarakat Indonesia. Selain dari pada itu, bangsa Indonesia pernah mengalami masa lalu yang penuh luka akibat adanya konflik antar anak bangsa yang sangat merugikan. Sejak turunnya Presiden Suharto, krisis moneter dan krisis politik yang terjadi sejak akhir 1997 pada gilirannya mengakibatkan terjadinya krisis sosio-kultural dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya Choirul Mahfudz menyebutkan (2016:82) bahwa krisis sosial budaya yang meluas dapat dilihat dalam berbagai bentuk semisal potensi disintegrasi sosial-politik yang disebabkan euforia kebebasan yang mendekati kebablasan, menurunnya kesabaran sosial dalam menghadapi realitas kehidupan yang sulit sehingga mudah melakukan tindakan kekerasan dan anarki, terjadinya konflik yang berkaitan dengan politik, isu kesukuan, isu keagamaan seperti di Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, dan lain-lain.

Kamanto Sunarto (2011) mengemukakan bahwa dampak pemberian hak otonomi kotamadya dan kabupaten sejak tahun 2000 telah juga menjadi sumber gesekan, tidak hanya antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kotamadya, tetapi juga antara lokal dan regional kelompok etnis dan agama. Sementara gerakan separatis bersenjata yang berlarut-larut terus mengancam integritas teritorial Indonesia, gerakan-gerakan lokal dan

regional oleh kekuatan-kekuatan sosial mengarah pada pecahnya beberapa propinsi dan, sebagai konsekuensinya, peningkatan homogenitas etnis penduduk masing-masing propinsi baru. Perkembangan baru-baru ini muncul kekhawatiran bahwa peningkatan primordial provinsialisme lebih lanjut bisa melemahkan nasional Indonesia dan integrasi sosial.

Sehubungan dengan persoalan-persoalan primordialisme itu, bagi Wasino (2011:5), maka konsep multikulturalisme menjadi isu penting untuk disebarluaskan di Indonesia. Hal ini penting karena pasca ambruknya rezim otoritarianisme Orde Baru menuju masyarakat demokratis harus didukung dengan tatanan masyarakat yang demokratis yang menghargai perbedaan paham budaya. Pemikiran ini sesungguhnya sebagai wujud revitalisasi dari pemikiran para pendiri bangsa menuju masyarakat Indonesia yang bersatu tanpa membedakan warna kulit, suku bangsa, agama, dan tingkatan sosial. Multikulturalisme pada saat ini perlu disebarluaskan dalam khalayak yang lebih luas. Jalur-jalur mainstream dapat berupa lembaga politik, lembaga pendidikan, media masa, keluarga lembaga keagamaan, dan kepariwisataan (Wasino, 2011).

Multikulturalisme merupakan institusionalisasi dari keragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok etnis di dalam suatu negara bangsa (nation state) melalui bahasa, sistem hukum, kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan seluruh bidang kehidupanlainnya. Multikulturalisme dengan demikian merupakan cara pandang yang mengakui sekaligus menghormati perbedaan dalam suatu bingkai kebersamaan dan kesederajatan.

### **Relevansi Pendidikan Multikultural dalam Doktrin Islam**

Secara etimologi pendidikan dalam bahasa Arab berasal dari kata tarbiyah, dengan kata kerja rabba yang memiliki makna mendidik atau mengasuh. Dengan demikian, pendidikan di dalam Islam adalah bimbingan oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal anak didik sehingga dapat terbentuk pribadi muslim yang baik. Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogi, yaitu dari kata "paid" yang artinya anak dan agogos

artinya membimbing. Oleh sebab itu, istilah pedagogi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak (the art and science of teaching children) (Suryana dan Rusdiana, 2015:66).

Zakiah Daradjat (2016:24) menjelaskan bahwa jika hendak melihat pengertian pendidikan dari segi bahasa, maka harus menelusurinya melalui kata dalam bahasa Arab. Hal ini tidak lain karena ajaran Islam ditemukan dalam bahasa tersebut. Kata "pendidikan" yang umum digunakan sekarang, dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah, dengan akar kata rabba. Kata "pengajaran" bahasa Arabnya adalah ta'lim, dengan akar kata 'allama. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya tarbiyah wa ta'lim sedangkan pendidikan dalam bahasa Arabnya adalah Tarbiyah Islamiyah.

Mortimer J. Adler, sebagaimana dikutip Arifin (2016:11) mengartikan pendidikan adalah proses dengan mana semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui sarana yang secara artistik dibuat dan dipakai oleh siapapun untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu kebiasaan yang baik. Sedangkan pendidikan Islam lebih menekankan pada keseimbangan dan keserasian perkembangan hidup manusia, Omar Muhammad Al-Touny Al-Syaebani mendefinisikan pendidikan Islam sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitarnya melalui proses kependidikan.

Zakiyuddin Baidhawiy sebagaimana disebut Suryana (2015:326) memerinci karakteristik pendidikan agama Islam berwawasan multikultural, yaitu:

- a. Belajar hidup dalam perbedaan
- b. Membangun saling percaya.
- c. Memelihara saling pengertian (mutual understanding).
- d. Menjunjung sikap saling menghargai (mutual respect).

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam Islam mempunyai peranan dan pengaruh yang besar dalam mengubah perilaku manusia, karenanya Islam menaruh perhatian yang besar

terhadap proses tarbiyah, dan dalam proses tarbiyah sejak masa awal Islam sudah diajarkan mengenai toleransi dan menghargai perbedaan. Secara historis, menurut Mustaqim dan Mustaghfiroh (2013:116), semangat multikulturalisme dalam Islam sangat terlihat jelas pada zaman Rasulullah. Di Madinah, Rasulullah melakukan sebuah transformasi sosial, di mana seluruh masyarakatnya hidup secara damai. Padahal saat itu masyarakat Madinah sangatlah plural, baik dalam agama, suku, bani maupun nasab. Konsep hidup bersama secara damai tersebut merupakan manifestasi dari kesepakatan bersama yang dikenal dengan "Piagam Madinah". Dalam Piagam yang memuat 47 pasal tersebut, tidak pernah sekalipun disinggung kata "Islam" dan "Alquran", meskipun mayoritas masyarakatnya pada saat itu adalah muslim. Piagam tersebut memuat kesepakatan antara masyarakat migran (muhajirin), etnis Madinah, suku Aus, Khazraj, Qainuqa', Nadlir dan Quraidhah, dengan latar belakang agama Islam, Yahudi, Nasrani, dan Musyrik.

Ibnu Khaldun memberi penjelasan sebagaimana disebut Omara (2015:42) bahwa Islam telah memberikan kebebasan beragama bagi umat manusia seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 256. Keanekaragaman budaya negara-negara seperti bahasa, cara hidup, agama dan pakaian serta nilai-nilai praktis adalah indikator dari peradaban seorang manusia. Lazim dipahami bahwa landasan utama doktrin Islam adalah Al-Qur'an dan sunah Nabi. Sehingga siapa saja yang akan mengukur suatu hal dengan perspektif Islam, maka ia harus mengukurnya dengan dua sumber utama tersebut. Pendidikan multikultural memiliki relasi konseptual dan relevansinya dengan doktrin agama Islam. Hal itu dapat dipahami dari Al-Qur'an yang menyebut bahwa Tuhan benar-benar telah memuliakan umat manusia (Q.S. Al-Isra [17]:70). Selain itu, Tuhan juga secara jelas menegaskan bahwa Ia "sengaja" menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda, dengan maksud agar manusia saling mengenal, saling mengakui eksistensinya, dan saling menghormati (Q.S. Al-Hujurat [49]:13).

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabbari (2009:5216-5217) memberikan penjelasan terkait Al-Isra ayat 70 bahwa setiap manusia

dianugerahi kekuasaan dan kemuliaan untuk mengelola alam semesta, dan keutamaan atau kelebihan atas makhluk lain. Pernyataan At-Tabari ini secara implisit mengaskan bahwa setiap individu manusia memiliki kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga sudah sepatutnya sesama manusia saling memuliakan dan menghormati. Selanjutnya seolah diperinci oleh Wahbah Zuhaili (2014:131) yang menyebut di dalam tafsirnya bahwa kelebihan yang Allah berikan kepada manusia sehingga ia mulia adalah karena manusia dianugerahi akal, ilmu, kemampuan mengelola alam semesta, bentuk manusia, berbudaya, berperadaban, dan lain sebagainya. Dua mufassir dari generasi klasik dan kontemporer tersebut sama-sama menegaskan bahwa manusia secara alami memiliki keutamaan, kelebihan, dan kemampuan lebih. Sehingga dalam pergaulan sosial, sudah sepatutnya mendapatkan rekognisi yang memadai terkait eksistensinya yang unik, bahkan mendapat jaminan atas keunikannya untuk dapat hidup berdampingan dengan yang lain secara sejajar.

Adapun terkait Q.S. Al-Hujurat ayat 13, Thabbari (2009:7546-7548) menjelaskan bahwa setiap manusia dilahirkan dari percampuran laki-laki dan perempuan. Yang menarik, Thabbari juga menjelaskan bahwa sejatinya umat manusia memiliki hubungan nasab antara satu dan lainnya, baik berhubungan secara dekat maupun jauh. Pernyataan ini seolah ingin menegaskan bahwa sejatinya setiap orang memiliki hubungan kekerabatan dengan semua orang, baik kekerabatan yang jauh maupun dekat. Sementara Wahbah Zuhaili (2014) mengaitkan ayat 13 Q.S. Al-Hujurat ini dengan dua ayat sebelumnya yang menitik-beratkan larangan menduga-duga negatif kepada orang lain, dan larangan menganggap orang lain sebagai pihak yang lebih rendah. Uraian menarik diberikan oleh Muhammad Ratib al-Nabulsi (2016:580) di dalam tafsirnya. Ia mengelaborasi dengan menyebut bahwa tatkala seseorang menginginkan sepotong roti, maka ia patut menyadari bahwa ada sekian ratus orang yang ikut andil dalam menyajikan roti yang dikehendakinya. Para pihak yang terlibat adalah sejak yang menanam gandum, memanen, hingga yang terlibat dalam proses akhir pembuatan roti. Uraian Nabulsi seolah hendak mengingatkan bahwa apa pun yang ada pada

diri setiap individu, sejatinya adalah karena andil dari individu lainnya yang sangat banyak. Tafsiran di atas meneguhkan eksistensi manusia sebagai yang dimuliakan bahkan oleh Tuhan. Sederhananya, jika Tuhan saja menegaskan bahwa Ia memuliakan manusia, maka sangat tidak patut jika ada manusia yang menganggap rendah manusia lain. Bahkan ayat-ayat tersebut kiranya membuat sadar bahwa atas apa yang kita nikmati, ada peran ratusan bahkan ribuan pihak lain. Berangkat dari keyakinan seperti ini, maka penulis berpandangan bahwa multikulturalisme adalah memiliki relevansi dengan doktrin Islam. Di dalam konteks pendidikan, penulis berpendapat bahwa pendidikan berperspektif multikultural memiliki landasan teologis yang sangat memadai, sehingga pendidikan multikultural sangat reliable untuk diterapkan pada masyarakat plural-religius.

Jalaludin As-Suyuthi (2016:499) memberikan informasi mengenai asbab nuzul Q.S Al-Hujurat ayat 13. Disebutkan bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abi Malikah, ia mengatakan; tatkala hari pembebasan kota Makkah, Bilal kemudian naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan adzan. Sebagian orang berkata, "Bukankah itu adalah hamba sahaya berkulit hitam yang adzan di atas Ka'bah?" Sebagian lagi berkata, "Apabila Allah marah, maka Allah akan mengganti dengan yang lainnya." Maka Allah menurunkan ayat: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan....." .

Selanjutnya dapat ditegaskan bahwa pendidikan Islam yang berwawasan multikultural adalah suatu pendidikan yang membuka visi dan cakrawala yang lebih luas. Mampu melintas batas kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama sehingga mampu melihat "kemanusiaan" sebagai keluarga yang memiliki perbedaan ataupun kesamaan cita-cita (Suryana & Rusdiana, 2015, p. 322).

## KESIMPULAN

1. Pendidikan multikultural merupakan konsep, ide, atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (set of believe) dan penjelasan yang mengakui serta menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup,

- pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara.
2. Pendidikan multikultural sebagaimana tersebut adalah sangat urgen untuk diimplementasikan dalam praksis pendidikan. Hal ini karena pendidikan berperspektif multikultural diyakini mampu menumbuh-kembangkan peserta didik menjadi pribadi yang bukan hanya bangga atas dirinya (budaya, bahasa, dan kekhususan lain yang dimilikinya), namun ia juga mampu mengakui, menerima, menghormati kekhususan yang berbeda yang dimiliki orang lain mereka siap hidup dalam kesejajaran..
  3. Pendidikan multikultural memiliki relasi konseptual dan relevansinya dengan doktrin agama Islam. Hal itu dapat dipahami dari Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa Tuhan benar-benar telah memuliakan umat manusia (17:70). Selain itu, Tuhan juga secara jelas menegaskan bahwa Ia "sengaja" menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda, dengan maksud agar manusia saling mengenal, saling mengakui eksistensinya, dan saling menghormati (49:13).

#### DAFTAR PUSTAKA

- al-Nabulsi, Muhammad Ratib. (2016). *Tafsir al-Nabulsi*. Urdun: Al-Fursan.
- Arifin, H. (2016). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- As Suyuthi, Jalaluddin, (2016). *Asbabun Nuzul* (5 ed.). (A. M. Maqasaid, Trans.) Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Banks, James A. (2001). *Handbook on Muticultural Education*., San Fransisco: Jossey Bass.
- Banks, James A. (2015). Multicultural Education. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 18-21.
- Daradjat, Zakiah. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dede Rosyada (2014) *Jurnal Sosio Didaktika*: Vol. 1, No. 1 Mei 2014
- Dewantoro, Ki Hajar. (1977). *Karya Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhu Taman Siswa.
- Driyarkara. (1980). *Tentang Pendidikan*. Jakarta: Kanisius.
- Galtung, Johan. (1969). Violence, Peace, and Peace Research,. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167.
- Galtung, Johan. (1973). *Theories of Conflict: definition, dimension, negations, formations*. Amerika Serikat: University of Hawaii.
- Harto, Kasinyo. (2014). *Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,.
- Idris, Zahara. (1987). *Dasar-dasar Kependidikan*. Padang: Angkasa Raya.
- Jarir At-Thabbari, Abu Ja'far. (2009). *Jami'u al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Mesir: Daarussalam.
- Kementrian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer I*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Alqur'an.
- Khaldun, Ibnu. (2016). *Mukaddimah*. (M. Ilham, Trans.) Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Mahfudz, Choirul. (2016). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maslikhah. (2007). *Quo Vadis Pendidikan Multikultural: Rekonstruksi Sistem Pendidikan berbasis Kebangsaan*. Surabaya: JP Books.
- Mustaqim, M., & Mustaghfiroh, H. (2013). Pendidikan Islam Berbasis Multikulturalisme. *ADDIN*, 7(1), 105-127.
- Nozick, Robert. (1974). *Anarchy State and Utopia*. New York: Basic Books.
- Omara, N., Che Noha, M. A., Hamzaha, M. I., & Majidb, L. A. (2015). Multicultural Education Practice in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 174, 1941-1948.
- Parekh, Bhikhu. (2000). *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. London : Macmillan.
- Pruitt, D., & Rubin, J. (2011). *Social Conflict*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rawls, John. (2003). *A Theory of Justice* . Cambridge: Harvard University Press.
- Rosyada, Dede. (2017). *Madrasah Dan Profesionalisme Guru Dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daerah*. Depok: Kecana.
- Suparlan, Parsudi. (2002). *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. Simposium Internasional Bali ke-3*, Denpasar, Bali: Jurnal Antropologi Indonesia.
- Suryana , Yaya., & Rusdiana, H. (2015). *Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa, Konsep-Prinsip- Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taufiq, Imam. (2016). *Alqur'an Bukan Kitab Teror: membangun perdamaian berbasis Alqur'an*,. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Tilaar, H.A.R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Gramedia.
- Tilaar, H.A.R. (2010). *Pendidikan Nasional Indonesia dan Multikulturalisme*. Diskusi terbatas Sistem Pendidikan Nasional: Antara Kebijakan dan Pelaksanaan. Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta.
- Wasino. (2011). *Multikulturalisme dalam Perspektif Sejarah Sosial*. Seminar Multikulturalisme dan Integrasi Bangsa dalam Pembangunan Budaya dan Pariwisata. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Semarang.
- Yaqin, M. (2005). *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Zuhaili, Wahbah. (2014). *Al-Tafsir Al-Munir: fi Al-Aqidah wa Al-Syariah, wa Al-Manhaj*. Damaskus: Daar al-Fikr.

